



RENCANA KERJA TAHUN 2021

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TANGERANG

Gedung Usaha-Usaha Daerah Lantai 2 Jl. H. Somawinata
Komplek Pemkab Tigaraksa KABUPATEN TANGERANG

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program kerja pembangunan bidang/sector tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman, peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan ketahanan pangan pada tahun berjalan yaitu Tahun 2021. Renja SKPD ini memuat gambaran tentang pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun rencana 2021. Penyusunan Rencana Kerja tahun 2021 ini didasarkan kepada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2023 Kabupaten Tangerang.
2. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.
3. Data Statistik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang.
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2020.

Semoga Rencana Kerja tahun 2021 ini dapat dijadikan bahan acuan untuk melaksanakan kegiatan agar tercapai keberhasilan pembangunan Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Tangerang.

Tigaraksa, Januari 2021

Kepala Dinas



Dr. H. AZIZ GUNAWAN, MM

NIP. 19670822 198709 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
 BAB II. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI.....	11
2.1. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	11
2.2. Reviu terhadap Rancangan awal RKPD	14
2.3. Tabel.1 Reviu RKPD Tahun 2020.....	15
 BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	21
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	21
3.2. Tujuan dan Sasaran	28
3.2.1. Tujuan	28
3.2.2. Sasaran	28
3.3. Tabel.2 Tujuan Sasaran dan Indikator Sarana Tahun 2021.....	30
3.4. Program dan kegiatan	31
3.3.1. Program setiap OPD	33
3.3.2. Program Dinas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019	40
3.5. Tabel.3 RKPD Tahun 2021 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	45
 BAB IV PENUTUP	61

BAB I

PENDAHULUAN

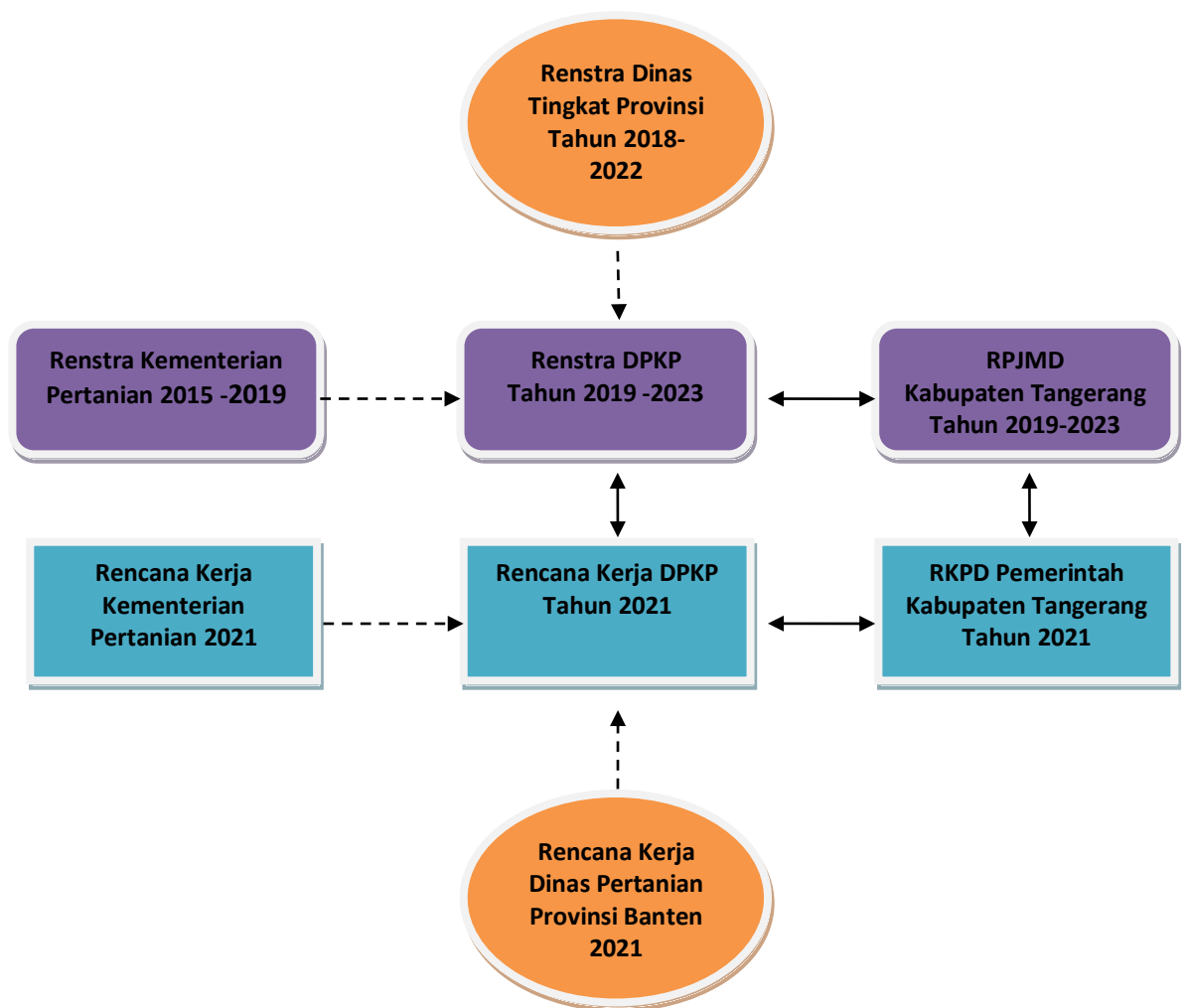
1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran/tujuan pembangunan urusan tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman, peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan Ketahanan Pangan selama Tahun 2019 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Persiapan penyusunan Rencana Kerja
- b. Penyusunan rancangan Rencana Kerja
- c. Pelaksanaan forum OPD
- d. Penetapan Rencana Kerja

Penyusunan Rencana Kerja dilaksanakan oleh tim penyusun yang beranggotakan seluruh pejabat. Rencana Kerja Tahun 2021 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2019 - 2023. Penjabaran yang dimaksud menitikberatkan pada penyelarasan prioritas, sasaran, program, kegiatan prioritas pembangunan tahunan urusan tanaman pangan, hortikultura dan

aneka tanaman, peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan ketahanan pangan dengan dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Tangerang, Renstra dan Rencana Kerja Dinas tingkat Provinsi Banten serta Renstra dan Rencana Kerja Kementerian Pertanian. Keterkaitan antara Rencana Kerja OPD dengan dokumen Renstra OPD, RKPD dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Tangerang, Renstra dan Rencana Kerja Dinas tingkat Provinsi, Renstra dan Rencana Kerja Kementerian Pertanian dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- n. Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang;

- q. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Nomor 4);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01-Kep.Huk Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 ;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- u. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2021 adalah untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan urusan Pertanian dan Peternakan yang lebih terarah, efektif dan terkoordinasi antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan baik Pusat, Provinsi maupun dengan Kabupaten/Kota yang

berbatasan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2021 :

1. Mewujudkan penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah tahap ke 3 (Tahun 2021).
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan Pertanian dan Peternakan antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan.
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.
4. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2021 , terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja SKPD, proses penyusunan Rencana Kerja OPD. keterkaitan antara Rencana Kerja SKPD dengan dokumen RKPD, dengan Renstra SKPD, dengan Rencana Kerja Dinas tingkat Provinsi,

dan dengan Rencana Kerja Kementrian/Lembaga, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat uraian tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD Bab ini memuat Kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun lalu (tahun 2020) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2021). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja

SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil laporaan kinerja tahunan OPD dan atau realisasi APBD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD
3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan rancangan awal RKPD dengan analisis hasil kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berisikan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD

3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3. Program dan kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan kegiatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya
- d. Tabel rencana program dan kegiatan

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah- kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut

BAB II

ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

2.1 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada Tahun 2021 berusaha bekerja secara konsisten berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang dan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2019-2023 . Pembangunan urusan tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman, peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan ketahanan pangan pada Tahun 2021 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode jangka menengah sebelumnya. Agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan diperlukan gambaran permasalahan yang akan dihadapi pada periode pembangunan jangka waktu lima tahun ke depan.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi sektor pertanian di masa yang akan datang, khususnya jangka waktu 2019-2023 , mencakup aspek seperti: kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; kepemilikan

lahan; perbenihan dan perbibitan; akses petani terhadap permodalan, kelembagaan petani; sinergitas sektor, standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan, dan kinerja pelayanan birokrasi pertanian/peternakan. Secara lebih lengkap, permasalahan mendasar tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global;
- b. Rendahnya ketersediaan infrastruktur (jalan usaha tani dan irigasi), sarana prasarana, lahan, dan air;
- c. Belum adanya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. Rendahnya produktivitas pertanian dan peternakan;
- e. Rendahnya ketersediaan benih/bibit pertanian dan peternakan;
- f. Gangguan/serangan organisme pengganggu tanaman;
- g. Masih tingginya angka kesakitan (*morbiditas*) dan angka kematian (*mortalitas*) hewan;
- h. Rendahnya pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan;
- i. Rendahnya mutu dan kesehatan hewan;
- j. Rendahnya sanitasi dan hygiene pada rantai produksi dan distribusi produk hewan;
- k. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan;
- l. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani;
- m. Belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian;
- n. Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian;

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang yang meliputi: analisis renstra OPD, analisis Rencana Kerja OPD Tahun 2019, maka dapat ditentukan isu-isu penting yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

1. Tingkat ketersediaan energi dan protein perkapita per hari
2. Ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan
3. Tingkat keragaman konsumsi pangan
4. Kerusakan saluran irigasi tingkat usaha tani dan irigasi tingkat desa
5. Kepemilikan luas lahan usaha tani
6. Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana budidaya pertanian dan peternakan
7. Pengendalian serangan hama dan penyakit tanaman
8. Peningkatan ketersediaan benih/bibit tanaman dan ternak
9. Peningkatan manajemen pemeliharaan dan reproduksi ternak
10. Penanggulangan penyakit hewan menular dan zoonosis
11. Peningkatan ketersediaan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH);
12. Peningkatan penerapan teknologi pertanian dan peternakan.

2.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan kerangka awal pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang didapat yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat, *stake holder* dan pemerintah sendiri. Rancangan Awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Rancangan Awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap OPD untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap OPD dalam menyiapkan rancangan Rencana Kerja OPD. Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan. Berdasarkan Rancangan awal yang dihasilkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang dan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dapat diketahui bahwa kegiatan pada tahun 2021 sesuai dengan Tabel 1 evaluasi rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD dibuat dengan melalui proses *bottom up* melalui mekanisme musrenbang yang disesuaikan dengan hasil renstra Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Pusat kemudian dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan kondisi tahun yang sebelumnya dan prediksi tahun yang akan datang dengan tujuan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan target. Adapun rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

2.3. TABEL 1
REVIU TERHADAP RKPD TAHUN 2020
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TANGERANG

NO	Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH				10.276.662.600
A	PROGRAM SKPD				2.672.510.100
B	PROGRAM WAJIB/PILIHAN				7.604.152.500
I	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat				1.026.430.000
1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Kabupaten Tangerang	Tersusunnya Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan	1 dokumen peta ketahanan pangan	132.720.000
			Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa Rentan Rawan Pangan	14 lokasi	
			Pemantauan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	12 dokumen	
2	Penyusunan Ketersediaan Pangan dan Bahan Makanan (NBM)	Kabupaten Tangerang	Tersusunnya Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 dokumen	33.950.000
			Laporan Ketersediaan Pangan Utama Berdasarkan Konsumsi Masyarakat	1 dokumen	
3	Pemantauan dan Analisis Akses dan Harga Pangan Pokok	Kabupaten Tangerang	Informasi harga, pasokan dan akses pangan pokok	Tersedianya informasi harga bahan pokok	113.935.000
			Stabilitas harga pokok pangan strategis	Tersedianya informasi stabilitas harga dan pasokan pangan	
4	Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan	Kabupaten Tangerang	Penguatan cadangan pangan pemerintah	Jumlah beras cadangan pangan	317.870.000

NO	Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
			Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	Jumlah lumbung pangan masyarakat	
5	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kabupaten Tangerang	Lomba Cipta Menu	Lomba Cipta Menu	69.105.000
			Kampanye makan buah dan sayur	Kampanye makan buah dan sayur	
			Pemeriksaan pangan segar asal tumbuhan	Pemeriksaan pangan segar asal tumbuhan	
			Analisis pola konsumsi pangan masyarakat dan skor pola pangan harapan	Analisis pola konsumsi pangan masyarakat dan skor pola pangan harapan	
6	Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari	Kabupaten Tangerang	Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari	Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari	358.850.000
2	Program Pemberdayaan Petani dan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan				1.161.250.000
1	Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis dalam PEDANA dan PENAS	Kabupaten Tangerang	Jumlah Penyuluh yang mendampingi Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah Penyuluh yang mendampingi Petani dan Pelaku Agribisnis	0
2	Peningkatan Kinerja Kelompok	Kabupaten Tangerang	Tersusunnya RDKK	1027 kelompok tani	158.220.000
			Jumlah Peningkatan Kinerja Kelompok Tani	121 kelompok	
3	Optimalisasi Balai Penyuluh	Kabupaten Tangerang	Jumlah Percontohan budidaya pertanian		1.003.030.000
			Diseminasi inovasi teknologi pertanian		

NO	Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
			Rehab Gedung BPP		
4	Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Kabupaten Tangerang	Jumlah Penyuluh Pertanian yang mengikuti pelatihan	50 orang	0
			Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian Swadaya	10 orang	
III	Program Peningkatan Produksi dan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan				4.062.919.500
1	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Kabupaten Tangerang	Luas Kawasan Agropolitan	100 Ha	1.087.362.500
2	Optimalisasi Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kabupaten Tangerang	Luas Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui pemberian insentif sarana produksi pertanian	13,685 Ha	908.150.000
3	Monitoring Pupuk Bersubsidi	Kabupaten Tangerang	Laporan Monitoring Pupuk	75 kios	0
4	Pengelolaan Statistik Pertanian	Kabupaten Tangerang	Data Statistik Tanaman Pangan dan hortikultura	29 dokumen	9.600.000
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Kabupaten Tangerang	Jumlah AlatMesin Pertanian pra panen	45 unit	432.190.000
			Jumlah AlatMesin Pertanian pasca panen	10 unit	
			Luas Pengendalian Hama Terpadu	200 Ha	
6	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Hortikultura	Kabupaten Tangerang	Jumlah Produksi Bawang Merah	98 ton	297.310.000

NO	Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Produksi Cabe Merah	214 ton	
7	Pengembangan Perbenihan dan Perbibitan Pertanian	Kabupaten Tangerang	Jumlah Benih Padi sebagai Cadangan Benih Daerah	10 ton	258.932.000
			Jumlah Bibit Unggul	10 jenis tanaman	
8	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Pangan	Kabupaten Tangerang	Jumlah Produksi Padi	309 ton	109.375.000
			Jumlah Produksi Jagung	249 ton	
			Jumlah Produksi Kacang Tanah	57 ton	
9	Pembangunan Gudang Pertanian	Kabupaten Tangerang	Pembangunan Gudang Sarana Pertanian	1 unit	960.000.000
IV	Program Peningkatan Produksi dan Penerapan Teknologi Peternakan				907.478.000
1	Pengembangan Pembibitan dan Budidaya Ternak	Kabupaten Tangerang	Jumlah akseptor ternak ruminansia besar	600 ekor	237.500.000
			Jumlah peternakan yang mendapat keterampilan dalam pengelolaan bibit ternak	100 orang	
			Jumlah populasi ternak ruminansia kecil	30 ekor	
2	Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna dan Sarana Peternakan	Kabupaten Tangerang	Jumlah Peternak yang mendapat Pelatihan	70 orang	171.625.000

NO	Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
			Jumlah sampel pakan ternak dan bahan baku pakan	60 sampel	
			Jumlah sarana peternakan	15 unit	
3	Peningkatan skala usaha kelompok ternak	Kabupaten Tangerang	Jumlah kelompok ternak	1 kelompok	50.000.000
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak	Kabupaten Tangerang	Jumlah sarana dan prasarana perbibitan dan hijauan pakan ternak	1 paket	448.353.000
V	Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				446.075.000
1	Pengadaan Obat dan Sarana Kesehatan Hewan	Kabupaten Tangerang	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan obat hewan	40 orang	175.000.000
			Jumlah obat hewan dan sarana kesehatan	2 paket	
2	Surveillance Penyakit Hewan	Kabupaten Tangerang	Jumlah hewan yang nebdapat pelayanan gangguan reproduksi	200 ekor	90.000.000
			Identifikasi penyakit hewan	1.000 sampel	
3	Pelayanan Kesehatan Hewan di UPT Puskesmas	Kabupaten Tangerang	Jumlah hewan yang mendapat pelayanan keswan	1.000 ekor	42.575.000
4	Pemeriksaan Mutu dan Kesehatan Produk Hewan	Kabupaten tangerang	Jumlah sampel produk hewan	60 sampel	42.000.000
5	Peningkatan Sanitasi Higiene Melalui Pencegahan Penyakit Food Borne Dease	Kabupaten Tangerang	Jumlah hewan dan daging kurban yang diperiksa	9.000 ekor	96.500.000
			Jumlah orang yang mengikuti pelatihan aplikasi hewan	60 orang	

NO	Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
			Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi tentang sanitasi dan higiene	60 orang	

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Visi pembangunan dalam RPJM 2019-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut dijabarkan menjadi Tujuh Misi serta Sembilan Agenda Prioritas yang disebut dengan (NAWA CITA). Berdasarkan Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) tersebut, maka agenda prioritas bidang pertanian terdiri dari dua hal, yakni: Peningkatan Agroindustri (Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional) dan Peningkatan Kedaulatan Pangan (Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik).

Arah kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2021 , disusun berpedoman pada RPJMN tahun 2019-2030 , RPJMD Provinsi Banten tahun 2018-2022 dan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 . Tujuannya agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat menjabarkan dan mensinkronisasikan kebijakan yang telah digariskan secara regional dan nasional.

Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai dalam pembangunan nasional 2015-2019 serta mempertimbangkan lingkungan

strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2019-2024 adalah:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim.
5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan.
7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2019-2024 adalah pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka Kementerian Pertanian menyusun strategi pembangunan pertanian yang disebut sebagai Tujuh Strategi utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan
2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian
3. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit
4. Penguatan kelembagaan petani
5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan petani
6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi
7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian.

Arah Kebijakan tersebut menjadi acuan dalam rencana utama penguatan sektor pertanian yang diimplementasikan menjadi program unggulan Banten. Tahun 2021, arah pembangunan perekonomian Banten ditekankan kepada peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pertanian, peningkatan intensifikasi dan diversifikasi usaha, penyediaan bibit/benih unggul bersertifikat, pengolahan hasil dan peningkatan nilai tambah ditingkat petani yang didukung oleh fasilitas pemasaran produk dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan.

Sedangkan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tangerang tidak terlepas dari arahan Rencana Jangka Panjang Kabupaten Tangerang tahun 2005-2025. Tahun 2021 merupakan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023. Arah kebijakan periode ini selain difokuskan pada sektor yang masih perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, diantaranya

pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung perekonomian masyarakat sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis industri dan UMKM dengan menitikberatkan pada sektor hilir (peningkatan kualitas jaringan irigasi dan pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan kelautan). Merevitalisasi pusat-pusat perekonomian masyarakat seperti pasar desa atau tradisional dan peningkatan mutu produk unggulan diharapkan dapat menjadi stimulus bagi percepatan pengembangan perekonomian daerah.

Sejalan dengan arah kebijakan daerah serta berdasarkan Perda Kabupaten Tangerang Nomor 11 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang mempunyai Tugas Pokok "membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman, peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengembangan sumber daya manusia pertanian, serta ketahanan pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah". Penjabaran pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Tangerang dengan memperhatikan visi dan misi serta aspirasi dan dinamika pembangunan daerah. Kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan sebagaimana yang terkandung dalam Rencana Strategis 2019-2023 antara lain sebagai berikut:

1. Mensinergikan upaya peningkatan kapasitas produksi pangan;
2. Mengembangkan dan memperkuat keterampilan masyarakat dalam hal menyediakan makanan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang;
3. Mengembangkan dan memperkuat kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat hingga di tingkat desa dan atau komunitas;
4. Meningkatkan koordinasi pengelolaan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah daerah serta pencegahan dan penanggulangan rawan pangan;
5. Meningkatkan akses pangan melalui pengembangan sistem distribusi yang efektif dan efisien;
6. Memberlakukan Harga Pembelian Pemerintah pada komoditas pangan strategis;
7. Mengembangkan *Buffer stock Management* (pembelian oleh pemerintah pada waktu panen dan operasi pasar pada waktu paceklik) pada komoditas pangan strategis;
8. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan ekonomi perdesaan dalam rangka mengembangkan sistem distribusi pangan dan aksesibilitas pangan serta upaya kewaspadaan pangan dan penanganan rawan pangan;
9. Meningkatkan penggunaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dalam hal pemantauan dan penanganan daerah rawan pangan;

10. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis bahan baku pangan lokal;
11. Mendorong, mengembangkan dan membangun, serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi pemenuhan hak atas pangan;
12. Memfasilitasi pelaku usaha dalam menyebarluaskan pangan berbahan baku pangan lokal;
13. Mengembangkan jaringan antar lembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan dan gizi;
14. Meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pangan;
15. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan;
16. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dengan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang mutu dan keamanan pangan;
17. Menata kelembagaan perbenihan / perbibitan;
18. Mengendalikan hama terpadu, Pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman maupun ternak, serta menurunkan tingkat kehilangan hasil pasca panen;
19. Menggalakkan penggunaan pupuk organik untuk mengembalikan kesuburan tanah;

20. Meningkatkan kualitas produk bidang tanaman pangan, hortikultura, aneka tanaman, peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan ketahanan pangan;
21. Meningkatkan pengolahan hasil produksi dan penanganan pasca panen;
22. Meningkatkan kinerja sumberdaya manusia pelaku utama dan pelaku usaha bidang tanaman pangan, hortikultura, aneka tanaman, peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan ketahanan pangan yang handal dalam rangka antisipasi terhadap aplikasi teknologi dan manajemen usaha;
23. Mengembangkan kelompok tani ternak yang handal dalam melakukan manajemen usaha;
24. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga penyuluhan dan medik veteriner baik PNS, swasta, swadaya dan THL;
25. Meningkatkan sarana dan prasarana Balai Penyuluhan Desa dan Kecamatan melalui pengembangan cyber extension khususnya informasi dan teknologi bidang tanaman pangan, hortikultura, aneka tanaman, peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan ketahanan pangan;
26. Meningkatkan pelayanan kesehatan ternak kepada masyarakat secara berkala;
27. Menyediakan obat-obatan hewan yang berkualitas dan terjangkau;
28. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pelaku usaha dan pelaku utama dalam hal sanitasi dan higiene.

29. 3.2 Tujuan dan Sasaran

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang pertanian dan peternakan.

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2021 adalah:

- a. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah;
- b. Pertumbuhan Sektor Pertanian
- c. Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Transparan Dan Akuntabel.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus

(*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2021 adalah:

1. Meningkatnya penganekaragaman Konsumsi Pangan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a. Capaian Skor Pola Pangan Harapan.

2. Meningkatnya Produksi Pertanian

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a. Kenaikan Produksi Padi.
- b. Kenaikan Produksi Jagung.
- c. Kenaikan Produksi Kacang Tanah.
- d. Kenaikan Produksi Cabe Merah.
- e. Kenaikan Produksi Bawang Merah.
- f. Kenaikan Produksi Sayuran Daun.
- g. Kenaikan Produksi Sayuran Buah.

3. Meningkatnya Produksi Peternakan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator Peningkatan status daerah rawan menjadi tidak rawan melalui intervensi.

- a. Kenaikan Produksi Daging Ruminansia.
- b. Kenaikan Produksi Daging Unggas.
- c. Kenaikan Produksi Telur.

4. Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a. Hasil Penilaian LKIP

3.3. Tabel 2

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DAERAH	Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Capaian Skor Pola Pangan Harapan	87,5 %
2.	PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN	Kenaikan Produksi Pertanian	Persentase Kenaikan Produksi Pertanian	1 %
		Kenaikan Produksi Peternakan	Persentase Kenaikan Produksi Peternakan	1,5 %
4.	MEWUJUDKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	Hasil Penilaian LKIP	70

3.4 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mengacu pada Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang terkait erat dengan visi Pemerintah Kabupaten Tangerang maupun dengan visi Provinsi Banten yang didasarkan pada potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Tangerang dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika pembangunan daerah. Visi Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 , adalah ***“Mewujudkan Masyarakat kabupaten Tangerang yang religius, cerdas, sehat dan sejahtera”***.

Sementara misinya adalah : (1) TANGERANG KREATIF yaitu dengan Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius; (2) TANGERANG TANGGUH yaitu dengan Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat; (3) TANGERANG MAPAN yaitu dengan Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan inovatif, berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK), Koperasi dan Industri Kecil Menengah (IKM); (4) TANGERANG TANGKAS yaitu dengan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel; (5) TANGERANG MANTAP yaitu dengan Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan

lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah; (6) TANGERANG KREATIF yaitu dengan Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Hal ini ditujukan melalui pernyataan misi nomor 3 (tiga) yaitu TANGERANG MAPAN (Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan inovatif, berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK), Koperasi dan Industri Kecil Menengah (IKM)) dan misi nomor 5 (lima) yaitu TANGERANG MANTAP (Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah). Pada misi ini terlihat peran serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam upaya pengembangan ekonomi daerah melalui pengembangan bidang pertanian.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas dan juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

3.3.1 Program Setiap OPD

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui optimalisasi operasional perkantoran, fasilitasi sarana prasarana kantor guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prima terhadap masyarakat. Adapun rencana program OPD yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
- b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
- e. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
- f. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- g. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- h. Program Penyuluhan Pertanian

Dari program tersebut diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan terdiri dari 1 kegiatan (satu) kegiatan dengan 1 (satu) sub kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

➤ Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan 5 (lima) sub kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

➤ Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan

➤ Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

➤ Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan

2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

➤ Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

➤ Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) sub kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

➤ Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dengan 20 (dua puluh) sub kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

➤ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- e. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian terdiri dari 5 (lima) kegiatan dengan 6 (enam) sub kegiatan antara lain :
 1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

- Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
- Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
- 2. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
 - Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
- 3. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pangan Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
- 4. Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecur
 - Sub Kegiatan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
- 5. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

f. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan 4 (empat) sub kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian

- Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

2. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

- Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya

3. Kegiatan Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum

- Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum

g. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan 5 (lima) sub kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
- 2. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
 - Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
- 3. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Medik Veteriner
- h. Program Penyuluhan Pertanian terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan 3 (tiga) sub kegiatan antara lain :
 - 1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
 - Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

3.3.2 Program Dinas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Th. 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah, untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, perlu adanya klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Bahwa klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2021 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melaksanakan program strategis yang sesuai dengan RPJMD tahun 2019-2023. Adapun rencana yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini bertujuan untuk ketersediaan pangan nasional, regional, kabupaten, kecamatan, desa sampai ketingkat rumah tangga yang cukup, aman dan terjangkau serta meningkatnya keragaman produksi untuk kemandirian konsumsi pangan

masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan. Pangan dalam arti luas mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein lemak dan vitamin serta mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Melalui program ini diharapkan akan terpenuhinya pangan dengan ketersediaan yang cukup, tersedia setiap saat, mudah memperoleh, aman dikonsumsi dan harga yang terjangkau. Program ini dijabarkan dalam 5 (lima) kegiatan dengan 7 (tujuh) sub kegiatan

b. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas dan posisi tawar petani, memperkuat kelembagaan tani dan meningkatkan akses petani terhadap sumberdaya produktif serta meningkatkan pendapatan dari hasil usahatani, Program ini dilaksanakan dengan tujuan terselenggaranya kegiatan penyuluhan untuk merubah perilaku pengetahuan, sikap dan keterampilan petani sehingga terwujudnya petani yang mandiri, berwawasan agribisnis serta mampu mengelola sumberdaya secara efisien dan berkelanjutan, dan juga mensejahterakan tenaga harian lepas penyuluh pertanian.

Program ini didukung oleh yang dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan dengan 3 (tiga) sub kegiatan

c. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini bertujuan untuk peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian/perkebunan yang dilaksanakan melalui kegiatan dalam rangka mengenalkan dan memberikan pengetahuan baru terkait penerapan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian/perkebunan yang diharapkan mampu mencapai swasembada pangan melalui penyediaan sarana produksi, pengelolaan lahan dan air, pengembangan perbenihan dan intensifikasi pertanian.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi hasil peternakan dalam upaya memenuhi kebutuhan daging dan telur mengiatkan usaha ekonomi pedesaan. Program ini dijabarkan dalam 8 (delapan) Kegiatan dengan 10 (sepuluh kegiatan

d. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner, yang dijabarkan dalam 3 (tiga) kegiatan dengan 5 (lima) sub kegiatan

Jumlah program strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebanyak 7 program, 16 kegiatan dan 25 sub kegiatan. Pemilihan Program dan Kegiatan sudah berdasarkan kebutuhan untuk pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Kebutuhan Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan usulan OPD Tahun 2021 sebesar Rp. 33.670.832.418

3.5.TABEL 3
RKPD TAHUN 2021 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Pagu
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target	
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN							559.184.000
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							559.184.000
2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Penguatan Cadangan Pangan	8 Kelompok	Tersalurkannya Bantuan Ke Kelompok P2L	8 Kelompok	Terlaksananya P2L di 8 Kelompok	8 Kelompok	559.184.000
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							1.051.213.000
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							583.628.000
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Penanganan Daerah Rawan Pangan	1 Persen	Tersusunnya Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	59.999.500

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Pagu
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target	
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Penanganan Daerah Rawan Pangan	1 Persen	Jumlah kawasan rumah pangan lestari	10 lokasi	Jumlah kawasan rumah pangan lestari	10 lokasi	299.988.500
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan	1 Persen	Tersusunnya Laporan Hasil Pemantauan Harga, Pasokan dan Akses Pangan	1 dokumen	Tersedianya Data informasi harga, pasokan dan akses pangan untuk 10 komoditas pangan strategis	1 dokumen	223.640.000
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota							217.585.000
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Penguatan Cadangan Pangan	10 Persen	Pengadaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah	25 Ton	Jumlah Beras Cadangan Pangan Pemerintah	25 Ton	217.585.000

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Pagu
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target	
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi							250.000.000
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Penanganan Daerah Rawan Pangan	1 Persen	Jumlah organisasi masyarakat yang mengikuti lomba cipta menu pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	2 kegiatan	Terlaksananya lomba cipta menu pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	2 kegiatan	250.000.000
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							184.199.000
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota							184.199.000
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Daerah Rawan Pangan	1 Persen	Jumlah lokasi pemberdayaan masyarakat desa rentan rawan pangan dan gizi	14 Lokasi	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa rentan rawan pangan dan gizi	14 Lokasi	184.199.000

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Pagu
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							26.602.261.363
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							72.370.000
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan	100 Persen	Tersusunnya dokumen hasil Forum OPD Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Tersedianya dokumen RKA,DPA, RKAP dan DPPA	1 Dokumen	Tersedianya dokumen hasil Forum OPD Tersedianya dokumen Rencana Kerja Tersedianya dokumen RKA,DPA, RKAP dan DPPA	1 Dokumen	46.270.000
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan	100 Persen	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	9.200.000

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Pagu
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target	
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan	100 Persen	Tersusunnya dokumen Data Pembangunan SKPD/Wilayah Tersusunnya dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen	Tersedianya dokumen Data Pembangunan SKPD/Wilayah Tersedianya dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen	16.900.000
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							23.888.672.863
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan	100 Persen	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK	100%	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK	1 Tahun	23.888.672.863
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							13.999.800
3	27	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan	100 Persen	Tersusunnya dokumen Aset/Barang Daerah	1 Dokumen	Tersedianya dokumen Aset/Barang Daerah	1 Tahun	13.999.800

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Pagu
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target	
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							164.950.000
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan	100 Persen	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	1 Paket	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal dan pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	1 paket	164.950.000
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							748.391.300
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan	100 Persen	Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	7.977.500

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Pagu
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target	
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan	100 Persen	Pengadaan Alat-alat Kebersihan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Paket	Tersedianya Alat-alat Kebersihan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor	1 paket	219.107.400
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan	100 Persen	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 paket	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 paket	74.200.900
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan	100 Persen	Pengadaan barang cetak dan penggandaan	1 Tahun	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 paket	35.105.500

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Pagu
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target	
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan	100 Persen	Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 paket	12.000.000
3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan	100 Persen	Pengadaan makanan dan minuman rapat dan makan minum tamu	1 Tahun	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan makan minum tamu	1 paket	100.000.000
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan	100 Persen	Adanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 paket	300.000.000

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Pagu
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target	
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							95.898.600
3	27	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan	100 Persen	Pengadaan mebeleur	1 Paket	Tersedianya mebeleur	1 paket	95.898.600
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	70 Persen	Adanya jasa surat menyurat	12 bulan	Terlaksananya jasa surat menyurat	12 bulan	12.000.000
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	70 Persen	Adanya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	95.000.000

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Pagu
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target	
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							635.025.000
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Adminsitasi Perkantoran	70 Persen	Adanya Jasa Administrasi / Teknis Pendukung Perkantoran Non PNS Tersedianya Jasa Iklan/Media Cetak Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor	1 tahun	Tersedianya Jasa Administrasi / Teknis Pendukung Perkantoran Non PNS Tersedianya Jasa Iklan/Media Cetak Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor	1 tahun	528.025.000
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							982.953.800
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	Adanya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	1 Tahun	421.621.800

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Pagu
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target	
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	Adanya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	14.000.000
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	Adanya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Paket	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Tahun	547.332.000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							1.700.537.404
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian							503.431.540
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	1 Persen	Pengadaan Benih Jagung, Kacang Tanah dan Padi	1 Paket	Tersalurkannya benih Jagung, Kacang Tanah dan Padi	1 Paket	284.999.600
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	1 Persen	Jumlah Alat dan Mesin Pertanian Pasca Panen Jumlah Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Tersedianya bufferstock pestisida	13 unit	Tersedianya Alat dan Mesin Pertanian Pasca Panen Tersedianya Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Tersedianya bufferstock pestisida	13 unit	218.431.940

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Pagu
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target	
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota							269.394.000
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	1 Persen	Pengadaan Benih Bawang Merah dan Cabe Merah	1 paket	Tersalurkannya Benih Bawang Merah dan Cabe Merah	1 Paket	
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota							270.999.964
3	27	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan	1,5 Persen	Kelompok yang mendapat pengetahuan dan keterampilan dalam penerapan teknologi peternakan	2 kelompok	Jumlah Kelompok yang mendapat pengetahuan dan keterampilan dalam penerapan teknologi peternakan	2 kelompok	270.999.964
								Pengadaan sarana peternakan	15 unit	Jumlah sarana peternakan	15 unit	
3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer							399.711.900
3	27	02	2.04	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Persentase hewan sehat yang recovery	5 Persen	Pengadaan obat-obatan dan sarana kesehatan hewan	2 Paket	Jumlah obat-obatan dan sarana kesehatan hewan	2 Paket	399.711.900

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Pagu
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target	
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota							257.000.000
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan	1,5 Persen	Jumlah akseptor ternak ruminansia besar	600 ekor	Jumlah akseptor ternak ruminansia besar	600 ekor	257.000.000
								Jumlah ternak unggas	681 ekor	Jumlah ternak unggas	681 ekor	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							2.304.358.751
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian							598.760.200
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B , Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2 B	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	1 Persen	Luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan melalui pemberian insentif sarana produksi pertanian (benih, pupuk dan obat-obatan)	3000 Hektar	Luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan melalui pemberian insentif sarana produksi pertanian (benih, pupuk dan obat-obatan)	3000 Hektar	519.211.200

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Pagu
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target	
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	1 Persen	Monitoring Pupuk Bersubsidi	75 kios	Tersedianya Data Pupuk Bersubsidi	75 kios	79.549.000
								Pengelolaan Statistik Pertanian	29 dokumen	Tersedianya Data Statistik Pertanian	29 dokumen	
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian							1.197.616.000
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Terbanguna n Ruang Informasi Penyuluhan	1 Persen	Pembangunan Ruang Informasi Pertanian	8 Lokasi	Adanya Ruang Informasi Pertanian	8 Lokasi	1.197.616.000
3	27	03	2.04		Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum							507.982.551
3	27	03	2.04	02	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Peningkatan kenaikan produksi pertanian	1 Persen	Pengadaan Benih untuk kawasan Agropolitan	100 hektar	Tersalurkannya Benih untuk kawasan Agropolitan	100 hektar	507.982.551

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Pagu
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							201.354.800
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota							49.999.900
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase hewan sakit yang recovery	5 Persen	Jumlah Sampel Penyakit Hewan	943 sampel	Jumlah sampel penyakit hewan	943 sampel	49.999.900
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner							151.354.900
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1,5 Persen	Jumlah Kelompok yang Meningkatkan Skala Usahanya	1 unit usaha	Adanya Kelompok yang Meningkatkan Skala Usahanya	1 unit usaha	79.999.900
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase jumlah sampel yang memenuhi SNI	5 Persen	Jumlah sampel produk hewan yang diperiksa	900 sampel	Sampel yang memenuhi SNI	900 sampel	71.355.000

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Pagu
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							280.345.000
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							280.345.000
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase Petani Mandiri	1 Persen	Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian yang mengikuti Pelatihan	50 orang	Adanya Tenaga Penyuluh Pertanian yang mengikuti Pelatihan	50 orang	150.350.000
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase Petani Mandiri	1 Persen	Jumlah Kelompok Tani yang Dibina	1027 kelompok	Adanya Kelompok Tani yang Dibina	1027 kelompok	129.995.000

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Pagu
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							308.932.700
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota							152.034.100
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Persentase peningkatan produktivitas pertanian	1 Persen	Pengadaan Benih Padi Sebagai Cadangan Benih Daerah Pengadaan bibit unggul tanaman hortikultura/perkebunan	10 Ton 10 Jenis	Adanya Benih Padi Sebagai Cadangan Benih Daerah Adanya bibit unggul tanaman hortikultura/perkebunan	10 Ton 10 Jenis	152.034.100
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota							156.898.600
3	27	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1,5 Persen	Jumlah sarana dan prasarana pembibitan dan hijauan pakan ternak	1 Paket	Adanya sarana dan prasarana pembibitan dan hijauan pakan ternak	1 paket	156.898.600
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							81.600.000
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian							81.600.000
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Prosentase Petani Mandiri	1 Persen	Operasional di BPP	8 BPP	Adanya Penyediaan Kebutuhan BPP	8 BPP	81.600.000

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Pagu
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							304.999.400
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							304.999.400
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Prosentase Petani Mandiri	1 Persen	Jumlah Balai Penyuluh Pertanian yang melakukan percontohan budidaya dan inovasi teknologi pertanian	8 BPP	Adanya Balai Penyuluh Pertanian yang melakukan percontohan budidaya dan inovasi teknologi pertanian	8 BPP	304.999.400
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							91.847.000
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota							91.847.000
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Persentase jumlah sampel yang memenuhi SNI	5 Persen	Jumlah sampel produk hewan yang diperiksa	60 sampel	Jumlah sampel produk hewan yang diperiksa	60 sampel	51.867.000
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Persentase jumlah sampel yang memenuhi SNI	5 Persen	Hewan yang mendapa pelayanan	1000 ekor	Adanya Pelayanan Keswan	1000 ekor	39.980.000
PAGU TOTAL												33.670.832.418

Target Program Unggulan DPKP Tahun 2021

No	Program Unggulan	Program/Kegiatan	Satuan	Target 2021	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	TANGERANG MANDIRI TAHAN PANGAN (TANGERANG MANTAP)	Pengembangan Kawasan Agropolitan	kawasan	1	2.200.000.000
		Bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian	Ha	100	
		<i>Pembangunan Pusat Hortikultura :</i>	<i>DED & Fisik</i>	<i>Fisik Tahap 2</i>	
		1. <i>Desain Pusat Hortikultura</i>	<i>DED</i>	0	655.000.000
		2. <i>Pembangunan Pusat Hortikultura</i>	<i>Unit</i>	1	
		3. <i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Hortikultura</i>	<i>Paket</i>	1	
		Optimalisasi Kawasan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan	kawasan	1	2.250.000.000
		Pemberian Insentif pada Lahan LP2B	Ha	3.000	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2021 disusun melalui proses tahapan yang cukup panjang mulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan sampai musrenbang Tingkat Kabupaten dalam rangka memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi didalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2021 diarahkan pada upaya pencapaian Visi, Misi, Sasaran dan Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja juga memiliki relevansi terhadap program pemerintah pusat terkait swasembada pangan untuk tiga komoditas utama yakni padi, jagung dan kedelai (pajale).

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, dalam pelaksanaan kegiatan yang sangat strategis dan tidak mampu dilaksanakan oleh Kabupaten, karena keterbatasan dana atau menyangkut kaitan kegiatan antar Kabupaten, maka perlu diusulkan kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 sebagian besar diarahkan untuk perbaikan infrastruktur pertanian dan penyediaan sarana prasarana pertanian dan peternakan. Selain itu, program dan kegiatan juga diarahkan untuk peningkatan ketahanan pangan melalui penyediaan benih unggul lokal baik komoditas tanaman pangan, hortikultura, maupun ternak.

Selain hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan program-program pembangunan di daerah, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program di masing-masing bidang Tahun 2021 yang didanai oleh APBD. Untuk itu Dinas wajib menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program pembangunan setiap Triwulan sekali kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Tangerang keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi bahan penyusunan RKPD Tahun berikutnya. Apabila dalam proses pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada tahun 2021 diperlukan perubahan dan revisi maka akan dilaksanakan dengan memperhatikan aturan yang berlaku.